BAB V
KESIMPULAN

Penelitian ini telah membuktikan keberhasilan diplomasi Uni Eropa dalam upaya penyelesaian permasalahan program nuklir Iran melalui proses perundingan negosisasi. Selama 12 tahun terakhir Uni Eropa telah mampu mencegah serangan militer ke Iran dengan menciptakan kerangka kerja negosiasi yang diterima dan dihormati. Pencapaian dan kemajuan terbesar dicapai Uni Eropa ditunjukan pada tahun 2013 -2015. Negosiasi membuktikan bahwa intervensi militer bukanlah satu-satunya jawaban atas ancaman proliferasi nuklir.

Menurut Strategi Keamanan Uni Eropa, visi kebijakan Uni Eropa secara eksternal adalah salah satu landasan multilateralisme yang efektif dan tidak diragukan lagi bahwa perundingan Iran telah dilakukan secara multilateral. Uni Eropa telah memiliki peran global dalam memimpin kelompok negara yang melakukan perundingan melalui negosiasi. Selain itu juga posisi Uni Eropa yang memimpin Komisi Bersama selama periode implementasi adalah pengakuan atas kredibilitas Uni Eropa.

Multilateralisme adalah bagian dari identitas internasional Uni Eropa namun juga landasan sebagai sikap Uni Eropa dalam bertindak. Relevan dalam pengertian ini untuk menggarisbawahi fakta bahwa Uni Eropa yang pada awalnya lebih memilih untuk bertindak sendiri melalui E3 kemudian berkembang dengan bergabungnya Amerika, China, dan Rusia di bawah formula kelompok P5 + 1 dengan Uni Eropa sebagai pihak ketiga. Keterwakilan Uni Eropa terutama oleh Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negri dan Keamanan Bersama yang bertindak sebagai mediator antara Iran dan kelompok tersebut.

Dari sudut pandang Uni Eropa, instrumen ekonomi dan politik serta keterlibatan jangka panjang dianggap sebagai solusi terbaik dalam menangani kasus proliferasi nuklir. Uni Eropa tidak mencoba dari awal untuk memecahkan masalah

dengan ancaman namun selalu berusaha menarik dengan menawarkan insentif. Dalam konteks ini, Uni Eropa telah mencoba memberi sebanyak mungkin pilihan ke Iran sebagai salah satu cara agar dapat membujuknya untuk meninggalkan beberapa bagian program proliferasi nuklir. Uni Eropa terus melakukan perundingan selama Iran tidak memulai kembali memperkaya uranium dan juga menolak untuk mengirim kasus Iran untuk diselesaikan oleh DK PBB karena dianggap tidak akan produktif dan akan membahayakan proses negosiasi dalam implikasi keamanan internasional dari isu nuklir

Bagi Uni Eropa, kesepakatan yang telah dicapai pada kurun waktu 2013 - 2015 baik itu JPOA dan JCPOA merupakan alternatif terbaik untuk perang lain di Timur Tengah atau bom nuklir Iran yang mengancam rezim nonproliferasi global. Namun, tanggung jawab Uni Eropa tidak berakhir dengan kesepakatan Iran dan Uni Eropa akan memimpin pemantauan pelaksanaannya. Uni Eropa terus memiliki peran penting dalam melaksanakan kesepakatan tersebut melalui peran Perwakilan Tinggi sebagai koordinator Komisi Bersama yang mengawasi pelaksanaannya.

Uni Eropa membantu menerapkan Lampiran III pada Joint Comprehensive Plan of Action, mengenai kerja sama nuklir sipil dengan proyek keselamatan nuklir di Iran senilai lebih dari 5 juta euro. Uni Eropa telah memainkan peran penting dalam mencegah eskalasi konflik militer. Ini merupakan prestasi besar mengingat kompleksitas permasalahan dan minimnya kerjasama pemain kunci, terutama Iran. Uni Eropa masih merupakan negosiator kunci sebagai bagian dari kelompok P5+1.

Melalui analisis peran Uni Eropa dalam negosiasi dan implementasi JCPOA, serta untuk menunjukkan bahwa peran Uni Eropa dalam memecahkan isu nonproliferasi yang disajikan oleh program nuklir Iran dapat dijalankan secara baik sesuai dengan landasan dan prinsip yang dipegang oleh Uni Eropa. Meskipun banyak pihak yang terlibat dalam proses perundingan

tersebut, Uni Eropa menjadi pihak yang paling netral dan independen sehingga mendapat kepercayaan untuk memimpin proses perundingan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan program nuklir Iran. Meskipun demikian, Uni Eropa tetap menjunjung tinggi tujuan utama kelompok P5 +1 agar membatasi program nuklir Iran.

Pandangan konstruktivisme mengenai organisasi internasional dalam hal ini hubungannya dengan Uni Eropa lebih menekankan pada peran norma, nilai dan kepentingan Eropa dalam mengejar tujuan kebijakan luar negeri, daripada hanya memperhatikan kepentingan negara-negara anggota. Konstruktivis juga memperhatikan pengaruh norma-norma internasional yang dibangun secara sosial terhadap agen-agen dalam sistem internasional, Uni Eropa menjadi salah satunya.

Uni Eropa memainkan peran penting dalam diplomasi antara Iran dan enam kekuatan utama dunia yang didukung oleh pemilihan Presiden Hassan Rouhani 2013. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton memimpin perundingan yang menghasilkan kesepakatan nuklir sementara November 2013. Dan penggantinya, Federica Mogherini, memimpin perundingan yang mengarah pada kesepakatan final bulan Juli 2015.

Pada tahun 2015, Uni Eropa mulai mengeksplorasi cara untuk membangun kesepakatan nuklir. Mogherini menyatakan tertarik untuk mengintegrasikan Iran ke dalam kerangka regional untuk memecahkan krisis di Timur Tengah dan bekerja sama untuk menghadapi ancaman Negara Islam (ISIS). Dua faktor kunci memfasilitasi upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah nuklir pada tahun 2013 adalah negosiasi saluran balik antara Amerika Serikat dan Iran yang dimulai pada tahun 2009, dan pemilihan pemimpin senior Hassan Rouhani menjadi Presiden Iran pada bulan Juni 2013. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton memimpin kelompok P5+1 dalam pembicaraan dengan Iran yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan sementara

November 2013 atau Joint Plan of Action. Iran berkomitmen untuk menghentikan aspek paling sensitif dari programnya dan memungkinkan dilakukannya inspeksi nuklir PBB dengan imbalan bantuan sanksi sederhana.

Dengan menggunakan landasan multilterisme yang efektif, Uni Eropa berupaya untuk melakukan pendekatan keamanan secara menyeluruh. Komitmen antara Uni Eropa dan negara anggotanya untuk bekerja sama dalam mengatasi prioritas keamanan mereka dalam kerangka kerja yang menekankan kerjasama yang sinergis antara institusi multilateral (khususnya organisasi PBB dan regional) serta berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku (dengan mempertahankan prinsip penggunaan kekuatan sebagai upaya terakhir). Ini berarti bahwa ancaman keamanan senjata pemusnah massal (WMD) proliferasi dan terorisme internasional harus ditangani melalui landasan multilaterimse yang efektif.

Upaya penyelesaian masalah tidak hanya dapat diselesaikan melalui kekuatan militer saja tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses diplomasi yang mana proses tersebut melewati proses perundingan dan negosiasi yang adil. Keberhasilan diplomasi Uni Eropa dapat disimpulkan menjadi 3 faktor.

Pertama, Strategi Keamanan Eropa melalui landasan multilterisme yang efektif. Uni Eropa secara tegas ditempatkan untuk berkontribusi dalam pengembangan perdamaian dan keamanan internasional. Uni Eropa sering dianggap sebagai perantara yang efektif dengan kemungkinan memainkan peran yang kredibel dan konstruktif dalam situasi ketidakstabilan dan konflik. Uni Eropa lebih efektif dapat menjadi mitra yang kredibel dan bermanfaat bagi PBB dan organisasi multinasional lainnya. Selain menggunakan landasan tersebut, Uni Eropa juga melakukan pendekatan yang dikombinasikan melalui metode diplomasi preventif dengan mengedepankan unsur pencegahan

terhadap segala bentuk resiko konflik yang bisa kapan saja terjadi.

Uni Eropa telah menggunakan segala sesuatu untuk menemukan solusi damai, Uni Eropa memainkan peran bertindak aktif bersama dengan E3 yang kemudian berkembang dengan bergabungnya Amerika, Rusia dan China menjadi kelompok P5+1, menghormati keputusan DK PBB dan temuan IAEA sehingga melalui mekanisme tersebut Uni Eropa terus melalukan segala bentuk upaya diplomatik dalam menyelesaikan permasalah program nuklir Iran.

Kedua, Uni Eropa telah melakukan upaya diplomatik sejak tahun 2003 dan kemudian mulai mendapatkan kemajuan yang positif pada tahun 2013-2015. Hal ini didukung dengan tercapainya 2 kesepakatan besar dalam proses sejarah perundingan yang kemudian diimplementasikan melalui Joint Plan of Action (JPOA) dan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Ketiga, Posisi Uni Eropa dalam proses perundingan yang diatur dalam Resolusi 2231 PBB tahun 2015 sebagai pembuktian kapabilitasnya. Peranan yang dijalankan disebutkan dalam Lampiran 4 yang menyebutkan: “Perwakilan Tinggi Perhimpunan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan ('Perwakilan Tinggi'), atau perwakilannya yang ditunjuk akan menjadi Koordinator Komisi Bersama”. Uni Eropa telah berkomitmen selain menjadi koordinator perundingan melalui peran yang multilaterimse agar tercapai konsensus damai yang saling menguntungkan.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa sekarang secara resmi mengkoordinasikan badan eksekutif perjanjian nuklir tersebut. Dalam Komisi Bersama, Uni Eropa diterima sebagai ketua delegasi antar kelompok di antara lima anggota tetap Dewan Keamanan, Jerman dan Iran. Perannya bukan hanya untuk mengadakan dan memfasilitasi diskusi tentang pelaksanaan kesepakatan nuklir, tapi juga untuk menengahi perselisihan di antara para peserta. Kebijakan Uni Eropa juga menunjukkan

batasan yang melekat pada pendekatan komprehensif dan tekad untuk bekerja sesuai dengan semua institusi internasional yang relevan.

Strategi WMD adalah bagian dari strategi keamanan Uni Eropa yang pertama dan berfungsi sebagai simbol kebangkitan Uni Eropa sebagai aktor keamanan global. Dari ungkapan ancaman WMD yang tidak ambigu ('ancaman yang berkembang terhadap perdamaian dan keamanan internasional'), secara logis diikuti bahwa “Memenuhi tantangan ini harus menjadi elemen sentral dalam tindakan eksternal Uni Eropa' dan bahwa Uni Eropa harus bertindak dengan tekad menggunakan semua instrumen dan kebijakan yang ada”.

Landasan pendekatan UE telah menjadi multilateralisme yang efektif, dikombinasikan dengan promosi lingkungan internasional dan regional yang stabil dan kerja sama yang erat dengan mitra utama, bersamaan dengan tekad untuk bertindak tegas melawan proliferator. Adopsi dan implementasi JCPOA membuktikan bahwa UE dapat membuat kebijakan luar negeri yang koheren dan efektif dan dapat membuat pihak lain terlibat dalam solusi damai yang saling menguntungkan untuk krisis tertentu.

Keberhasilan diplomasi Uni Eropa diwujudkan melalui tercapainya kesepakatan *Joint Plan of Action* tahun 2013 dan *Joint Comprehensive Plan of Action tahun 2015* untuk menjamin program nuklir Iran secara penuh bersifat damai dan juga memberi solusi jalan terbaik bagi kelompok P5+1 tidak dapat dikesampingkan. Bagi penulis, adanya peran organisasi internasional serta kerjasama yang sinergis antar organisasi dan negara – negara yang bersangkutan mampu menjadi kekuatan dalam menemukan solusi damai bagi semua pihak.